ANALISIS KINERJA

TAHUN 2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Jl Indrakila No. 36 Kebumen
Telp. (0287) 381794

PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

ANALISIS KINERJA
TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan dating.

Demikin Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 disampaikan, Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690922 199703 1 005

ANALISA KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : Permenpan No. 53 Tahun 2014

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024, mencakup 3 sasaran strategis yaitu :

a. Meningkatnya indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan
c. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KATAGORI
	Tujuan :					
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10%	69,86%	110,71%	Sangat Baik

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KATAGORI
	melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah					
	Sasaran strategis :					
1.	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	48,72%	71,16%	140,05%	Sangat Baik
2.	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,11%	75,78%	95,79%	Baik
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	85%	86,17%	101,37%	Baik

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Kinerja 2022 s/d 2024 dan Target 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025
			Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target
	Tujuan: Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81	55,61	103,36	59,27	49,33	83,23	63,10	69,86	110,71	66,89
	Sasaran :											
1	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	31,81	35,26	110,85	40,21	58,70	145,98	48,72	71,16	140,05	57,23
2	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	72,22	73,55	101,84	78,44	75,30	96,00	79,11	75,78	95,79	79,78
3	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	83	82,54	99,45	84	82,20	97,86	85	86,17	101,37	85,5

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Tabel III. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
	Tujuan :					
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10%	69,86%	70,69%	69,78%
	Sasaran strategis :					
1.	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	48,72%	71,16%	65,73%	89,30%
2.	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,11%	75,78%	80,44%	93,61%
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	85%	86,17%	87,00%	94,48%

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Tabel III. 5 Perbandingan Capaian dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	PROV JATENG	NASIONAL	CAPAIAN %
	Tujuan :					
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	48,35%*	Na	Na	110,71%
	Sasaran strategis :					
1.	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	71,16%	Na	Na	140,05%
2.	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	75,78%	Na	Na	95,79%
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	86,17%	Na	Na	101,37%

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Tabel III. 6 Anlisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Tujuan :					
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10%	69,86		
	Sasaran strategis :					
1.	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	48,72%	71,16%	Capaian melebihi target karena didukung oleh prosentase rumah layak huni yang didorong oleh penanganan RTLH bersumber dari APBD, Bankeu Pemdes , BSPS dan swadaya masyarakat serta CSR walaupun jumlah RTLH yang harus ditangani masih banyak	Tetap menjadi prioritas daerah dan berusaha mengusulkan ke Provinsi dan Pusat
2.	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,11%	75,78%	Target tidak tercapai karena banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan dan jangkauan yang cukup luas	Tetap menjadi prioritas daerah dan berusaha mengusulkan ke Provinsi dan Pusat
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	85%	86,17%	Pelayanan selalu ditingkatkan seluruh IKM sehingga dapat tercapai melebihi target.	Evaluasi SOP Pelayanan

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Secara rinci capaian kinerja tahun 2024 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran 1, “Meningkatnya Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman”,

Indikator “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman”

$$Rumus = \frac{(persentase\ rumah\ layak\ huni\ +\ persentase\ penanganan\ kawasan\ kumuh\ kewenangan\ kabupaten)}{2}$$

Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 48,72% terealisasi sebesar 71,16% dengan tingkat capaian 146,05%. Hal ini tercapai dengan dukungan capaian Persentase Rumah Layak Huni sebesar 93,70% Dan Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha sebesar 48,63%.

Persentase rumah tidak layak huni tertangani pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 64,48%, terealisasi sebesar 64,56% atau dengan tingkat capaian sebesar 100,12%. Dalam target Renstra tahun 2024 sebanyak 33 unit terealisasi sebanyak 28 unit aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran. 5 unit RTLH yang tidak terlaksana, disebabkan 1 penerima bantuan meninggal dunia, 3 penerima bantuan sudah direalisasikan dengan sumber dana lain, 1 penerima bantuan tidak siap swadaya.

Tabel III. 7 Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	306.885	354.807	354.807	354.807	354.807
2	Jumlah rumah layak huni	306.285	328.465	329.912	331.359	332.165
3	Jumlah rumah tidak layak huni	600	26.342	24.895	23.266	22.642
4	Persentase rumah layak huni	99,80	92,58	92,98	93,44	93,67
5	Persentase rumah tidak layak huni	0,20	7,42	7,02	6,56	6,33

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2024

Berdasarkan database 2014 sampai dengan akhir tahun 2020 sisa jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 600 unit. Setelah dilakukan updating data pada tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni meningkat menjadi 26.342 unit dengan jumlah rumah total sebanyak 354.807 unit. Pada Renstra Disperkimhub Kabupaten Kebumen 2021-2026 ditargetkan menangani RTLH

sebanyak 1267 unit dari Sumber APBD Kabupaten Kebumen. Penanganan RTLH Tahun 2021 adalah 2.293 unit terdiri dari 600 unit sisa database 2014 dari APBD dan 1.693 unit menyelesaikan database Tahun 2020, sehingga sisa jumlah RTLH sampai akhir Tahun 2021 menjadi 26.342 unit. Pada Tahun 2022 penanganan RTLH 1.447 unit terdiri dari APBD sebanyak 90 unit dan sumber dana lainnya 1.357 unit sehingga sisa jumah RTLH menjadi 24.895 unit. Pada tahun 2023 penanganan rumah tidak layak huni dari berbagai sumber anggaran sebanyak 1.629 unit sehingga pada akhir Tahun 2023 sisa rumah tidak layak huni sebanyak 23.266 unit. Penanganan RTLH pada Tahun 2024 bersumber dana dari APBD Kabupaten Kebumen sebanyak 28 unit dan didukung dari sumber dana lainnya antara lain dari Bankeupemdes APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 456 unit, APBN (BSPS) sebanyak 241 unit, dana CSR / Komunitas Sedulur Kebumen 2 unit, Baznas Provinsi sebanyak 24 unit, Baznas Kabupaten sebanyak 55 unit dan Dana Desa sebanyak 547 unit. Pada tahun 2024 RTLH telah tertangani sebanyak 806 unit sehingga sisa RTLH menjadi 22.642 unit.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan RTLH terutama terkait dengan pembiayaan, dimana anggaran yang disalurkan oleh pemerintah merupakan dana stimulan, sehingga sangat diperlukan dukungan berupa swadaya masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan dan lahan aman dari bencana sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta melakukan pendampingan dalam pelaksanaan di lapangan.

Selain itu upaya yang dilakukan dengan mengupayakan dukungan anggaran untuk penanganan RTLH dari berbagai sumber, di samping dari APBD Kabupaten, juga APBD Provinsi, APBN, APBDes maupun sumber pendanaan lainnya.

Tabel III. 8 Jumlah Rumah Korban Bencana yang Tertangani di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah korban bencana	127	118	112	91	80
2	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	9	6	21	11	10

Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun 2024 melalui APBD Kabupaten dengan Target pelaksanaan 10 unit terdiri dari 9 unit Relokasi dan 1 unit Rehabilitasi dengan total alokasi anggaran Rp.468.788.000 dan terealisasi 10 unit atau telah mencapai 100%, sehingga sisa rumah korban bencana Tahun 2024 dari hasil data assement BPBD sebanyak 80 unit telah tertangani 10 unit sehingga tersisa sebanyak 70 unit.

Tabel III. 9 Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	354.807	354.807	354.807	354.807	354.807
Jumlah Rumah Tangga	418.900	418.900	461.823	466.372	476.112
Backlog	64.093	64.093	107.016	111.565	121.305

Sumber : Susenas, 2018, Portal Satu Data Kabupaten Kebumen, 2024

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah 64.093 unit. Penanganan Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 menggunakan anggaran DAK Perumahan. Alokasi penanganan Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Perumahan sejumlah 23 unit, namun penambahan jumlah rumah tangga cukup pesat, dan tidak diimbangi pertumbuhan penyediaan rumah, sehingga jumlah Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen menjadi 107.016 unit, dan terus meningkat pada Tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 111.565 unit, dan 121.305 unit.

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu ;

a. Penataan Bangunan
b. Jalan Lingkungan
c. Jaringan Air Limbah
d. Pengelolaan Persampahan
e. Penyediaan Air Minum, dan
f. Proteksi Kebakaran.
g. Drainase
h. Masih luasnya sisa kawasan kumuh pada akhir Tahun 2023 yaitu 309,7 Ha perlu kolaborasi penanganan Kumuh dari Organisasi Perangkat Daerah di

Kabupaten Kebumen untuk pengentasan kawasan kumuh. Untuk mengatasi permasalahan pada Program Kawasan Permukiman tersebut, dilakukan optimalisasi peran Pokja PKP sebagai koordinator penanganan kumuh. Selain itu dilakukan pendataan kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan mandiri oleh Desa, sehingga pada Tahun 2024 dari Target penanganan Kumuh 8 Ha, mampu tercapai 81,02 Ha pada akhir Tahun 2024. Perhitungan Penanganan kawasan kumuh tidak hanya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, tetapi juga yang dilakukan secara mandiri oleh desa dengan menggunakan anggaran desa. Dengan demikian, capaian penanganan kumuh yang dilakukan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III. 10 Data Lokasi Kawasan Kumuh dan
Penanganan Kawasan Kumuh
Tahun 2020 s/d 2024

No	Uraian Luas	Penanganan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Kumuh	343,27	343,27	343,27	343,27	343,27
2	Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	31,43	0	0,5	2,16	81,02
3	Luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani	311,84	311,84	311,34	309,18	228,16

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2024

Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha, meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kec. Sempor (1 Desa), Kec. Gombong (2 kelurahan dan 3 desa), Kec. Karanganyar (4 kelurahan dan 6 desa), Kec. Sruweng (1 Desa), Kec. Pejagoan (1 Desa), Kec. Kebumen (4 kelurahan dan 13 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Dari total luasan kawasan kumuh seluas 343,27 Ha, area yang telah tertangani dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 115,11 Ha. Dengan

demikian, sisa luas kawasan kumuh yang perlu ditangani pada akhir tahun 2024 seharusnya 228,16 Ha.

3.2.2 Sasaran 2, Sasaran “Terpenuhinya Indeks Infrastruktur Perhubungan”

Indikator “Indeks Infrastruktur Perhubungan”

Indeks Infrastruktur Perhubungan pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 79,11% dan terealisasi sebesar 75,78% atau tingkat ketercapaiannya sebesar 95,79%. Pencapaian target Indikator Indeks Infrastruktur Perhubungan di dukung oleh Persentase ketersediaan perlengkapan jalan sebesar 60,67%; Persentase ketersediaan Terminal Tipe C sebesar 66,77%; Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik sebesar 100%. Secara rinci data Sarana dan prasarana Infrastruktur Perhubungan tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 11 Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 s/d 2024

No	Kelengkapan Jalan	Kebutuhan	2022	2023	2024	%
1	LPJU	14.000	5465	6528	7134	50,96
2	APILL	60	54	58	58	96,67
3	rambu	8.000	2638	2751	2751	34,39
	Prosentase I					60,67
4	Terminal	6	4	4	4	66,67
	Prosentase II					66,67
5	Alat Uji Kir	9	9	9	9	100,00
	Prosentase III					100,00
	Indeks Infrastruktur Perhubungan					**75,78**

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

Pada tahun 2024 Alokasi anggaran untuk Urusan Perhubungan meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatannya meliputi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kegiatannya meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota,Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, serta Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan lalu lintas beserta fasilitas rambu-rambu lalu lintas berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berpindah tempat. Selain menggunakan kendaraan milik pribadi, masyarakat juga dapat bepergian dengan menggunakan kendaraan umum.

Untuk Capaian Kinerja Program 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 12 Capaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN		**Sasaran 1 : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**48,72%**	**71,16%**	**140,05%**	Sangat Baik	Aplikasi SEMARAK
1	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%	Sangat Baik	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha (%)	21,12%	48,63%	230,27%	Sangat Baik	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	76,32%	64,56%	84,59%	Baik	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman (%)	1,17%	2,16%	184,62%	Sangat Baik	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		**Sasaran 2 : Indeks Infrastruktur Perhubungan**	**79,11%**	**75,78%**	**95,79%**	Baik	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	Sangat Baik	
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,11%	75,78%	95,79%	Baik	

3.2.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi SAKIP mengalami kenaikan nilai SAKIP walaupun predikat masih sama yaitu dengan predikat BB. Peningkatan tersebut merupakan upaya seluruh pihak untuk menyusun dokumen perencanaan serta melakukan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu evaluasi capaian kinerja juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mencapai kinerja berikutnya.

1.3 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

3.2.1 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

a. Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor

29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

1.) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2.) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota

b. Target dan realisasi Pencapaian SPM

Dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Kebumen telah menentukan target pencapaian SPM Perumahan Rakyat tahun 2024. Untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten pada tahun 2024, yang merupakan jenis pelayanan penanganan permukiman Kumuh sesuai pada Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 dengan jumlah orang yang terlayani realisasi 10 unit sesuai mutu layanan dasar Penyediaan Rumah Layak Huni. Adapun Realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III. 13 Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN SPM (%)
			JML ORG YG AKAN TERLAYANI	APBD	JML ORG YG TERLAYANI	APBD	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	468,788,000	10	468,788,000	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh	9		9		100

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN SPM (%)
			JML ORG YG AKAN TERLAYANI	APBD	JML ORG YG TERLAYANI	APBD	
	daerah daerah kabupaten	fasilitas penyediaan rumah layak huni					

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

1.3.2 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu pengolahan air limbah domestic.

3.2.3 Target dan realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Target dan realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen bagian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Tahun 2024 mencapai 100%.

Realisasi capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 khususnya Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut :

Tabel III. 14 Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JML ORG YG AKAN TERLAYANI	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	%	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Ukuran Kuantitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik , setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	1267	1267	100%	9.627.375.823
		Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	350	350	100%	756.523.739
		Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar mauapun lubang tanah atau cubluk kembar	917	917	100%	

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

1.3.3 Dukungan Personnel

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III. 15 Dukungan Personil

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat secara umum berasal dari pegawai Bidang Perumahan Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dimana pada tahun 2024 jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	9	jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

Selain personil diatas didukung juga oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Selain itu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.3.4 Dampak/Manfaat Penerapan SPM Perumahan Rakyat

Dampak/manfaat penerapan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 16 Dampak/Manfaat Penerapan SPM Perumahan Rakyat

Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Terbangunanya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terdampak bencana alam
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Terbangunanya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

1.3.5 Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi serta upaya dan solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan pada penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Perumahan Rakyat

Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana.	Sedangkan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut yakni penanganan rumah korban bencana dilaksanakan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
	daerah daerah kabupaten	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni		

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

Tabel III. 18 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	468,788,000
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	468,788,000
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	468,788,000
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota	Penanganan Permukiman Kumuh	804,717,000

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

1.4 Realisasi Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan

Dari total anggaran pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp 9,411,755,000 Realisasi sebesar Rp. 9,123,293,884 atau dengan Tingkat capaian sebesar 96.94% dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 19 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PENDAPATAN DAERAH	**9,411,755,000**	**8,591,019,884**	**91.28**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,411,755,000	8,591,019,884	91.28
A.	Retribusi Daerah			
1.	Retribusi Jasa Umum	2,718,677,000	1,183,103,000	43.52
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	58,677,000	60,560,000	103.21
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,660,000,000	1,122,543,000	42.20
2.	Retribusi Jasa Usaha	6,693,078,000	7,407,916,884	110.68
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	173,347,000	231,342,875	133.46
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6,519,731,000	7,176,574,009	110.07
B.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
1.	Pendapatan Denda Retribusi Daera	-	-	-
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
JUMLAH		**9,411,755,000**	**9,123,293,884**	**96.94**

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

3.4.2 Realisasi Anggaran Belanja

Dari total anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp 58,233,263,000 Realisasi sebesar Rp 55,643,935,587 Anggaran tersebut untuk melaksanakan 6 program dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 20 Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
						KEU SPJ	FISIK
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498,787,000	497,945,417	99.83	100	0,17	0,00
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	211,660,000	1,199,449,762	98.99	100	1,01	0,00
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	804,717,000	727,378,224	90.39	100	9,61	0,00
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10,413,071,000	10,383,899,562	99.72	100	0,28	0,00
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,745,532,000	6,849,003,117	88.43	100	11,57	0,00
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	37,559,496,000	35,986,259,505	95.81	100	4,19	0,00
JUMLAH		**58,233,263,000**	**55,643,935,587**	**95.55**	**100**	**4,45**	**0,00**

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2024

Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar Rp. 58,233,263,000 dan terealisasi sebesar Rp. 55,643,935,587 (95.55%) terdapat silpa sebesar Rp. 2,589,327,413 (4,45%) berasal dari berapa kegiatan seperti, belanja gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal dunia serta insentif pendapatan yang tidak semuanya terealisasi dikarenakan capaian pendapatan Parkir Tepi Jalan tidak mencapai target.

3.5 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.5.1 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 21 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
	Tujuan :						
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui: meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	69,86%				
	Sasaran strategis :						
1.	**Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman**	**Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**71,16%**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**100**	Menunjang
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi**	**100**	**Menunjang**
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	**Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi**	**100**	**Menunjang**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Relokasi Program Kabupaten/Kota			
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Direhabilitasi	100	Menunjang
				Program Kawasan Permukiman	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	**79.07**	Menunjang
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/di bin	100	Menunjang
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	**100**	**Menunjang**
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100	Menunjang
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani**	**100**	**Menunjang**
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni**		**Menunjang**
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase Peningkatan akses air limbah aman**	**185.47**	**Menunjang**
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100	Menunjang
2.	**Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan**	**Indeks Infrastruktur Perhubungan**	**75.78%**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Indeks Infrastruktur Perhubungan**	**94.99**	**Menunjang**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan**	**110.19**	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi dan Terpelihara	100	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir**	**100**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	94.97	Menunjang
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral**	**100**	**Menunjang**
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah rakor penilaian andalalin**	**100**	**Menunjang**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi**	**100**	**Menunjang**
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum**	**100**	**Menunjang**
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota**	**100**	**Menunjang**
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Menunjang
3.	**Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen**	**Indeks kepuasan masyarakat**	**85,40%**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	**100**	**Menunjang**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					perangkat daerah yang tersusun		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Menunjang**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Pendidikan dan Pelatihan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**100**	**Menunjang**
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor		Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	100	Menunjang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2024

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.5.2 Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**%**	**48.72**	**56.6**	**116.17**	**2,928,235,000**	**12,808,672,965**	**99.08**	**1,280,014,827,035**	**1,292,823,500,000**
	Program Pengembangan Perumahan	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**	**498,787,000**	**497,945,417**	**99.83**	**49,380,754,583**	**49,878,700,000**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi**	**Lokasi Kec.**	**26**	**26**	**100**	**29,999,000**	**29,987,000**	**99.96**	**2,969,913,000**	**2,999,900,000**
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	26	26	100	29,999,000	29,987,000	99.96	2,969,913,000	2,999,900,000
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi**	**Unit Paket**	**25**	**25**	**100**	**468,788,000**	**467,958,417**	**99.86**	**46,410,841,583**	**46,878,800,000**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Direhabilitasi	Unit Rumah	10	10	100	468,788,000	467,958,417	99.82	46,410,841,583	46,878,800,000
	Program Kawasan Permukiman	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	**%**	**21.12**	**16.7**	**79.07**	**1,211,660,000**	**1,199,449,762**	**98.99**	**119,966,550,238**	**121,166,000,000**
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	**Ha**	**8**	**8**	**100**	**683,825,000**	**681,322,680**	**99.63**	**67,701,177,320**	**68,382,500,000**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibin	Kelompok Masyarakat	2	2	100	683,825,000	681,322,680	99.63	67,701,177,320	68,382,500,000
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	**Ha**	**8**	**8**	**100**	**527,835,000**	**518,127,082**	**98.16**	**52,265,372,918**	**52,783,500,000**
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	33	33	100	20,122,000	20,105,500	99.92	1,992,094,500	2,012,200,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	60	60	100	507,713,000	498,021,582	98.09	50,273,278,418	50,771,300,000
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani**	**%**	**76.32**	**76.32**	**100**	**804,717,000**	**727,378,224**	**90.39**	**79,744,321,776**	**80,471,700,000**
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni**	**Unit**	**33**	**33**	**100**	**804,717,000**	**727,378,224**	**90.39**	**79,744,321,776**	**80,471,700,000**
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Unit Rumah	33	33	100	804,717,000	727,378,224	90.39	79,744,321,776	80,471,700,000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki									
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	**Persentase Peningkatan akses air limbah aman**	**%**	**1.17**	**2.17**	**185.47**	**10,413,071,000**	**10,383,899,562**	**99.72**	**1,030,923,200,438**	**1,041,307,100,000**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik**	**Paket**	**18**	**18**	**100.00**	**10,413,071,000**	**10,383,899,562**	**99.72**	**1,030,923,200,438**	**1,041,307,100,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	18	18	100	9,632,855,000	9,627,375,823	99.94	953,658,124,177	963,285,500,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	12	12	100	780,216,000	756,523,739	96.96	77,265,076,261	78,021,600,000
	URUSAN PERHUBUNGAN	**Indeks Infrastruktur Perhubungan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**45,305,028,000**	**42,835,262,622**	**94.55**	**4,486,942,433,229**	**4,529,777,695,851**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**7,745,532,000**	**6,849,003,117**	**88.43**	**767,704,196,883**	**774,553,200,000**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**7**	**7**	**100**	**46,706,000**	**46,543,000**	**99.65**	**4,624,057,000**	**4,670,600,000**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	26,148,000	26,061,500	99.67	2,588,738,500	2,614,800,000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	20,558,000	20,481,500	99.63	2,035,318,500	2,055,800,000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**6,339,981,000**	**5,480,255,309**	**86.44**	**628,517,844,691**	**633,998,100,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	55	100	6,019,780,000	5,161,118,322	85.74	596,816,881,678	601,978,000,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	65	65	100	320,201,000	319,136,987	99.67	31,700,963,013	32,020,100,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**10**	**10**	**100**	**16,081,000**	**15,699,500**	**97.63**	**1,592,400,500**	**1,608,100,000**
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55	55	100	16,081,000	15,699,500	97.63	1,592,400,500	1,608,100,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**230,060,000**	**229,619,300**	**99.81**	**22,776,380,700**	**23,006,000,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	11,378,000	11,273,000	99.08	1,126,527,000	1,137,800,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	19,875,000	19,870,000	99.97	1,967,630,000	1,987,500,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	117,500,000	117,470,000	99.97	11,632,530,000	11,750,000,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	36	36	100	4,000,000	3,990,000	99.75	396,010,000	400,000,000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Perundang-Undangan yang Disediakan									
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100	36,057,000	35,990,400	99.82	3,569,709,600	3,605,700,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	41,250,000	41,025,900	99.46	4,083,974,100	4,125,000,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**Paket**	**6**	**6**	**100**	**44,879,000**	**44,068,500**	**98.19**	**4,443,831,500**	**4,487,900,000**
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100	44,879,000	44,068,500	98.19	4,443,831,500	4,487,900,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**137,470,000**	**134,277,900**	**97.68**	**13,612,722,100**	**13,747,000,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	3,281,000	3,280,000	99.97	324,820,000	328,100,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	101,814,000	98,635,650	96.88	10,082,764,350	10,181,400,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	32,375,000	32,362,250	99.96	3,205,137,750	3,237,500,000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**930,355,000**	**898,539,608**	**96.58**	**92,136,960,392**	**93,035,500,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100	202,219,000	197,563,608	97.70	20,024,336,392	20,221,900,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	100	7,000,000	6,985,000	99.79	693,015,000	700,000,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100	30,000,000	29,950,000	99.83	2,970,050,000	3,000,000,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	691,136,000	664,041,000	96.08	68,449,559,000	69,113,600,000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Indeks Infrastruktur Perhubungan**	**%**	**79.78**	**75.78**	**94.99**	**37,559,496,000**	**35,986,259,505**	**95.81**	**3,719,238,236,346**	**3,755,224,495,851**
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan**	**%**	**54**	**59.5**	**110.19**	**31,263,164,000**	**29,936,906,979**	**95.76**	**3,096,379,493,021**	**3,126,316,400,000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	7	7	100	20,420,474,000	19,582,629,087	95.90	2,022,464,770,913	2,042,047,400,000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12	12	100	10,842,690,000	10,354,277,892	95.50	1,073,914,722,108	1,084,269,000,000
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	**Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**168,568,000**	**138,275,708**	**82.03**	**16,718,524,292**	**16,856,800,000**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pembangunan Fasilitas Parkir										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	168,568,000	138,275,708	82.03	16,718,524,292	16,856,800,000
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik**	**%**	**100**	**100**	**100**	**375,668,000**	**367,329,665**	**97.78**	**36,474,366,186**	**36,841,695,851**
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	1	100	182,234,000	181,488,270	99.59	18,041,911,730	18,223,400,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	7254	6889	94.97	144,107,000	137,937,146	95.72	13,547,658,705	13,685,595,851
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	100	49,327,000	47,904,249	97.12	4,884,795,751	4,932,700,000
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**544,385,000**	**481,090,007**	**88.37**	**53,957,409,993**	**54,438,500,000**
	Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	544,385,000	481,090,007	88.37	53,957,409,993	54,438,500,000
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah rakor penilaian andalalin**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**13,425,000**	**12,780,700**	**95.20**	**1,329,719,300**	**1,342,500,000**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	12	12	100	13,425,000	12,780,700	95.20	1,329,719,300	1,342,500,000
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**2,387,332,000**	**2,386,508,319**	**99.97**	**236,346,691,681**	**238,733,200,000**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	2,387,332,000	2,386,508,319	99.97	236,346,691,681	238,733,200,000
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum**	**Bulan**	**12**	**12**	**100**	**2,740,437,000**	**2,597,300,127**	**94.78**	**271,446,399,873**	**274,043,700,000**
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	48	48	100	2,740,437,000	2,597,300,127	94.78	271,446,399,873	274,043,700,000
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota**	**Dokumen**	**80**	**80**	**100**	**66,517,000**	**66,068,000**	**99.32**	**6,585,632,000**	**6,651,700,000**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	12	12	100	66,517,000	66,068,000	99.32	6,585,632,000	6,651,700,000

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 0,99 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target, dimana 1 (satu) indikator belum dapat tercapai, sedangkan 4 (empat) indikator sudah dapat tercapai sesuai dengan target. Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman”, dengan Indikator “Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 48,72% terealisasi sebesar 71,16% dengan tingkat capaian 140,05%.

4.1.2 Sasaran 2 : “Terpenuhnya Indeks Infrastruktur Perhubungan” dengan Indikator “Indeks Infrastruktur Perhubungan”

Indeks Infrastruktur Perhubungan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 79,11% terealisasi sebesar 75,78% atau tingkat capaian 95,79%.

4.1.3 Sasaran 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Disperkimhub Kabupaten Kebumen” Dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Indeks kepuasan masyarakat pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 85% terealisasi sebesar 86,17% atau tingkat capaian 101,37%.

4.2 Permasalahan/Kendala.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

a. Anggaran untuk penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi beberapa kewenangan yaitu kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk masing- masing kewenangan belum sesuai dengan yang direncanakan.
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sedot tinja sehingga terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dari limbah domestik.
c. Sedangkan untuk pencapaian target cakupan rumah layak huni terkendala dengan ketersediaan anggaran.

d. Masih kurangnya perlengkapan jalan sehingga masih sering terjadi kemacetan dan kecelakaan yang mengancam keselamatan transportasi dan mengurangi kenyamanan masyarakat berlalu lintas.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

a. Untuk penanganan kawasan kumuh diupayakan dengan meningkatkan alokasi anggaran melalui usulan kepada instansi di tingkat provinsi maupun pusat, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten diprioritaskan untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.
b. Sedangkan untuk pencapaian cakupan rumah layak huni telah dilakukan pendataan Kembali dengan aplikasi Si Rumah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *Good and Clean Governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690922 199703 1 005